



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P)
TAHUN 2025**

**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAMBOLAKA
2026**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan bimbinganNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan kewajiban pemerintah menerapkan sistem kinerja instansi dalam rangka pengukuran pencapaian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran RPJMD kabupaten pada masing-masing organisasi perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Kami menyadari penyusunan LKIP ini masih jauh dari sempurna sesuai harapan. Oleh karena itu, sumbangan pemikiran yang konstruktif guna perbaikan sangat diharapkan baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak terkait.

Akhirnya dengan penuh rasa syukur kiranya LKIP ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Tambolaka, 20 Januari 2026

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Sumba Barat Daya,



Drh. Heryanto B. Bora
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 19780417 200803 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	2
1.4. KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	5
1.5. SARANA PRASARANA DAN FASILITAS PENUNJANG	6
1.6. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	7
1.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKIP	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. RENCANA KINERJA TAHUNAN	10
2.2. PROGRAM DINAS PERIKANAN	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. PENGUKURAN KINERJA	18
3.1.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DINAS PERIKANAN.....	19
3.1.2 URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA	20
3.1.3 EVALUASI KINERJA DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN	21
3.1.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN	22
BAB IV PENUTUP	
4.1. KESIMPULAN DAN SARAN	27

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2026 Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya melaporkan capaian kinerja (performance result) selama tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2025-2029.

Pada tahun 2025, Dinas Perikanan telah melaksanakan 5 program, 14 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Seluruh program kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2025 untuk mencapai 1 sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2025, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari indikator sasaran yang telah terlaksana baik.

Beberapa indikator sasaran yang dikategorikan berhasil adalah sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025			% Pencapaian Target
		Satuan	Target	Realisasi	
1.	Produksi perikanan tangkap	ton	1.680	2.013	120
2.	Produksi perikanan budidaya	ton	692	840,482	121
3.	Produksi Garam	ton	5	623,700	12.474

Hambatan yang harus diatasi dalam upaya mencapai sasaran kedepan adalah koordinasi lintas sektoral yang belum optimal. Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati kekurangan dan keberhasilan pencapaian sasaran yaitu:

1. Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada
2. Mendorong semua pihak untuk melakukan kreatifitas dan inovasi dalam menyelesaikan kegiatan

Berdasarkan program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025, Dinas Perikanan mendapat alokasi anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 4.603.327.294,00,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.330.103.544, dan Belanja Modal sebesar Rp. 273.223.750,-. Raelisasi belanja daerah sebesar Rp 4.358.608.656,00,- atau sebesar 94.70 %.-. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan dan bersumber dari Dana Alokasi Umum untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu laporan yang harus disiapkan dan disusun setahun sekali baik untuk kepentingan pimpinan atau pihak eksternal instansi, dan dibuat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Laporan kinerja yang harus disiapkan oleh instansi-instansi pemerintah untuk bahan monitoring yang pada akhirnya untuk tujuan pengendalian atas pelaksanaan tugas atau program/kegiatan tertentu, haruslah dapat memicu tindakan pengendalian itu. Untuk itu laporan kinerja yang demikian biasanya lebih menonjolkan pencapaian-pencapaian target kinerja jangka pendek, terinci, dan merupakan unsur-unsur yang berkontribusi kepada keberhasilan, menjadi bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah untuk tahun berikutnya. Jadi, baik laporan kinerja untuk tujuan pemantauan ataupun untuk tujuan pertanggung jawaban menjadi sangat penting karena pada akhirnya menampilkan informasi-informasi penting terkait pencapaian kinerja sebuah instansi.

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, Dinas Perikanan berkewajiban menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk menjelaskan/menggambarkan capaian Dinas Perikanan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya yang mutlak dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Pusat baik langsung maupun melalui Pemerintah Provinsi.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025, maka Dinas Perikanan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 yang akan menggambarkan kinerja yang dicapai Dinas Perikanan melalui program kegiatan selama satu tahun berjalan, diselaraskan dengan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (RENSTRA). Pada akhirnya lewat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini diharapkan juga dapat mengevaluasi kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya sehingga kinerja yang dicapai tahun berikutnya akan menjadi lebih baik.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari disusunnya Laporan Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya adalah untuk memberikan Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya secara tertulis, periodik dan melembaga sehingga dapat memberikan gambaran capaian kinerja pada tahun anggaran 2025 dalam rangka, mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Perikanan tahun 2025 – 2029.

Tujuan dari disusunnya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 ini adalah untuk menilai dan mengukur capaian Dinas Perikanan sehingga dapat dilihat tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijakan tujuan, sasaran Dinas Perikanan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Perikanan tahun 2025 – 2029.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya, maka tugas dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

a. Tugas dan Fungsi.

Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan ke pemerintah daerah.

Sedangkan fungsi yang diemban oleh Dinas Perikanan:

- 1) Merumuskan kebijakan di bidang Perikanan masyarakat, Budidaya dan bidang Perikanan Tangkap;
- 2) Melaksanakan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya dan bidang Perikanan Tangkap;
- 3) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Perikanan Budidaya dan bidang Perikanan Tangkap ;
- 4) Melaksanakan administrasi Dinas; dan
- 5) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

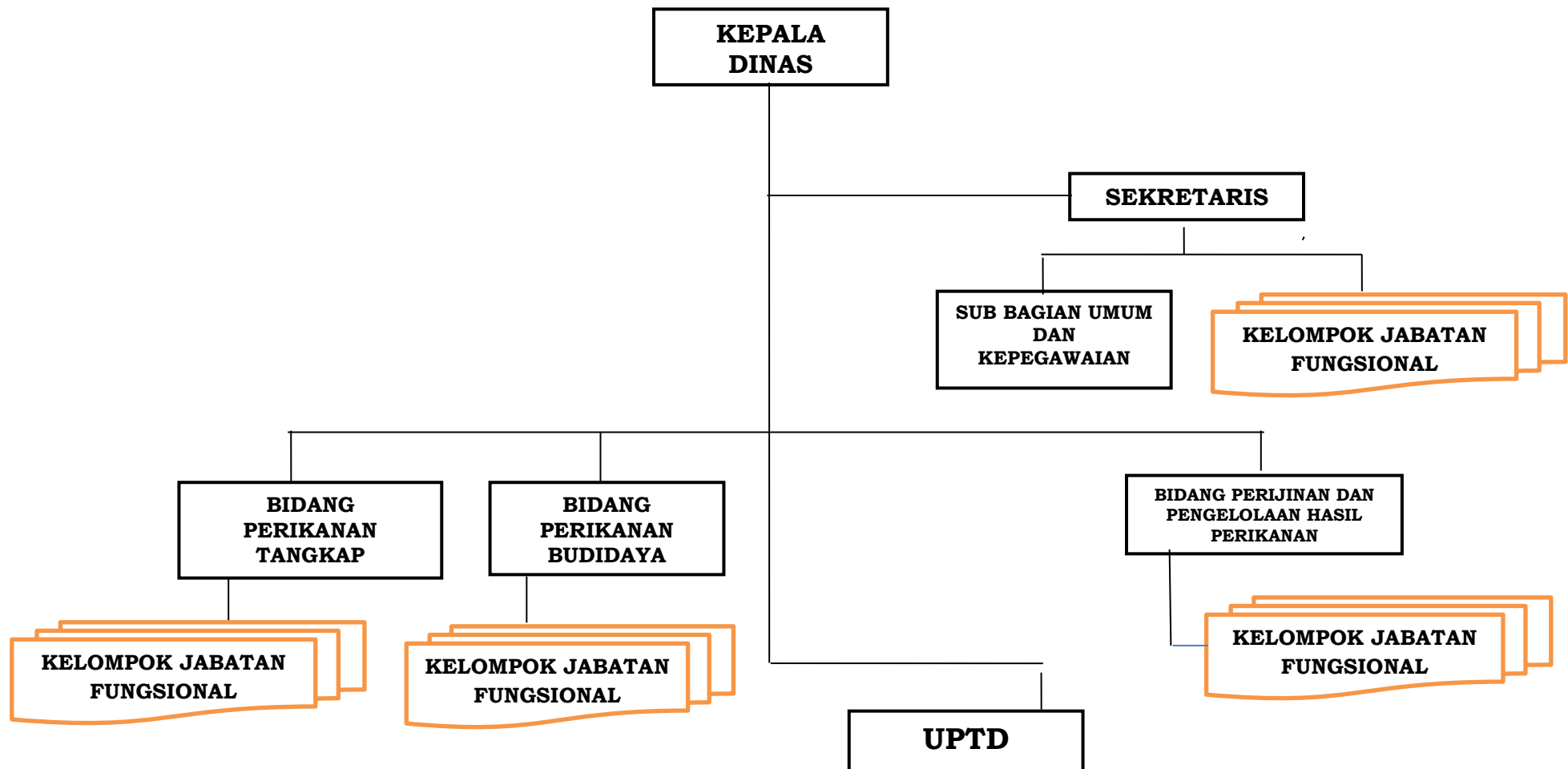
b. Struktur Organisasi.

Dinas Sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Kepala Dinas Perikanan;
 - a) Sekretaris terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian:
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
 - b) Bidang sebanyak 3 (tiga) bidang yang terdiri atas:
 - 1) Bidang Perikanan Tangkapa;
 - 2) Bidang Perikanan Budidaya;
 - 3). Bidang Perijinan dan Pengelolaan Hasil Perikanan.
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d) UPTD.

Adapun bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat di bawah ini.

1.3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya



1.4 KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya berjumlah 53 terdiri Pegawai Negeri Sipil 29 orang, Pegawai Kementrian 3 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 8 orang, dan tenaga Kontrak berjumlah 11 orang.

Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dalam hal ini sumber daya pegawai secara terperinci adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Golongan

- 1) Golongan IV : 4 Orang
- 2) Golongan III : 26 Orang
- 3) Golongan II : 3 Orang
- 4) Golongan I : -
- 5) Golongan V : 5 Orang
- 6) Golongan VII : 1 Orang
- 7) Golongan IX : 4 Orang

b. Berdasarkan Pendidikan

- 1) Magister (S2) : -
- 2) Sarjana (S1) : 32 Orang
- 3) Diploma (D3) : 3 Orang
- 4) SLTA : 7 Orang

c. Menurut Diklat Penjenjangan dan Perencanaan:

- 1) Pim II : 1 Orang
- 2) Pim III : 0 Orang
- 3) Pim IV : 6 Orang

d. Menurut Jabatan Struktural:

- 1) Eselon II/b : 1 Orang
- 2) Eselon III/a : 1 Orang
- 3) Eselon III/b : 3 Orang
- 4) Eselon IV/a : 1 Orang

1.5. SARANA PRASARANA DAN FASILITAS PENUNJANG

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa: kendaraan dinas, inventaris dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut masih kurang memadai sehingga masih perlu ditingkatkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan di bidang penyelenggaraan perikanan kepada masyarakat.

Adapun sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki Dinas Perikanan yakni keadaan kendaraan operasional dan ekonomi produktif, sebagaimana disajikan berikut ini:

a) Kepemilikan Tanah

No	Letak/ Alamat	Luas (m ²)	Pemanfaatan
1	Waikelo Sawah Desa Tema Tana Kec. Wewewa Timur	12.500	Kolam Air Tawar
			Bangunan Rumah Penjaga
2	Karita, Desa Karuni Kec. Loura	9.300	Kolam Air Tawar
3	Weekelo Desa Radamata Kec. Kota Tambolaka	10.000	-

b) Bangunan dan Gedung

No	Bangunan/Gedung	Kondisi	Letak/Alamat
1	Kolam Air Tawar, Rumah Jaga dan Gedung BBI	Baik	Waikelo Sawah, Kec. Wewewa Timur
2	Kolam Air Tawar, Rumah Jaga BBI	Baik	Karita Desa Karuni, Kec. Loura
3	Depo Pasar Ikan	Baik	Weekelo, Kec. Kota Tambolaka
4	Pos Pengawasan Pantai	Rusak	Huma, Kec. Kodi Utara
5	Pos Pengawasan Pantai	Rusak	Pero Konda, Kec. Kodi

c) Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Nama	Kondisi			Jumlah (unit)
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	Kendaraan Roda Empat	-	3	-	3
2	Kendaraan Roda Dua	3	-	3	6
3	Speedboat	-	-	2	2
4	Mesin Potong Rumput	1	-	3	4
5	Komputer	1	-	1	2
6	Laptop	11	2	8	21
7	Printer	6	-	7	13
8	Lemari	9	4	1	14
9	Meja Biro	5	-	-	5
10	Meja ½ Biro	39	2	-	41
11	Meja Rapat	1	-	-	1
12	Kursi Putar	1	-	4	5
13	Kursi Busa	3	-	-	3
14	Kursi Kayu	40	-	-	40
15	Kursi Plastik	10	-	14	24
16	Sofa (Set)	1	-	1	2
17	Scanner	-	-	1	1
18	Wireless	1	-	2	3
19	Absenal Fingerprint	1	-	-	1
20	Tempat sampah organik dan Non organik	1	-	-	1

1.6 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dengan melihat Struktur Organisasi dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perikanan sebagaimana diatur Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya, Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai peranan penting untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah dalam melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi salah satu tujuan bidang kelautan dan perikanan yang ingin dicapai. Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan aspek-aspek strategis yang diperoleh dengan mengakomodasikan isu-isu organisasi antara lain:

- Mengoptimalkan alokasi anggaran operasional BBI untuk mendukung intensifikasi produksi.
- Mengoptimalkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berinovasi.
- Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pengadaan bibit unggul di BBI, memaksimalkan sarana prasarana di BBI, Pabrik es dan cold storage untuk menunjang penangkapan ikan.

Akar masalah pengolahan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumba Barat Daya antara lain masih terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan, seperti unit pengolahan ikan, cold storage, serta jaringan distribusi yang belum memadai, sehingga hasil tangkapan nelayan sering dijual dalam bentuk segar dengan nilai tambah rendah. Rendahnya keterampilan nelayan dan pelaku usaha dalam teknik pengolahan, pengemasan, serta standar mutu juga menghambat peningkatan daya saing produk di pasar. Selain itu, akses permodalan dan dukungan teknologi pengolahan masih terbatas, sementara kelembagaan nelayan maupun kelompok usaha bersama belum berfungsi optimal dalam memperkuat rantai nilai. Kondisi ini diperparah oleh fluktuasi harga ikan, lemahnya akses ke pasar yang lebih luas, serta minimnya investasi sektor kelautan dan perikanan, sehingga potensi sumber daya laut daerah belum sepenuhnya mampu mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir.

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN LKIP

LKIP ini diawali dengan Kata Pengantar, Daftar Isi dan Ringkasan Eksekutif sebagai penuntun bagi pimpinan dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran singkat tentang informasi yang disampaikan oleh Batang Tubuh LKIP. Sedangkan Batang Tubuh LKIP dibagi 4 (empat) bab yang meliputi:

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, Profil Dinas Perikanan dan Sistematisa Penyajian LKIP.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada Bab II ini Menguraikan tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perikanan

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III ini menyajikan proses pengukuran kinerja yang meliputi penetapan indikator kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Setelah itu dilakukan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.

Bab IV. Penutup

Pada Bab IV ini menyampaikan simpulan laporan kinerja dan rencana strategis untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Kinerja Tahunan

RKT merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan tahun 2025 - 2029, dan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan perangkat daerah pada tahun berjalan yang mengacu pada IKU urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan RKT tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan PK antara Bupati Sumba Barat Daya dan Kepala Dinas sampai Kepala Bidang pada Dinas Perikanan yang memuat komitmen untuk melaksanakan dan mewujudkan rencana kinerja baik keluaran (output) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025 maupun hasil yang dicapai (outcome) dari program yang dilaksanakan tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang dipertanggung jawabkan kepada Kepala Daerah. Berikut ini disampaikan secara umum gambaran tentang Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025 - 2029 dalam kaitannya dengan penyusunan RKT dan PK tahun 2025 terutama yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran strategis.

1. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya

Visi merupakan cita-cita atau wawasan masa depan yang rasional dan ingin dicapai pada waktu tertentu dengan dilatarbelakangi oleh kondisi, potensi, tantangan dan peran suatu instansi. Visi Kabupaten Sumba Barat Daya adalah: “Terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya Hebat yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan, dan Berbudaya Menyongsong Indonesia Emas 2045”.

Pernyataan Visi Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi masyarakat Sumba Barat Daya dalam lima

tahun mendatang menjadi masyarakat yang Berkarakter baik, sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan dan Berbudaya.

Misi adalah suatu penjabaran dari visi yang merupakan suatu langkah ataupun tahapan yang semuanya harus dilalui oleh lembaga yang bersangkutan untuk dapat mencapai visi yang utama atau dengan kata lain sesuatu yang harus dilakukan agar tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan.

Misi pembangunan daerah tahun 2025-2029 untuk mewujudkan visi tersebut diatas adalah:

1. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan
2. Mewujudkan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan.
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
4. Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat
5. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur
6. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup
7. Meningkatkan Pelayanan Publik

Terkait dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya mendukung dalam pencapaian misi yang pertama yaitu Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan yang mana dalam penjelasan misinya yaitu mengembangkan potensi ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan Masyarakat.

Dengan mengembangkan produksi perikanan diharapkan mampu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat Daya yang meningkat pendapatannya sehingga kehidupannya menjadi sejahtera.

Dalam hal mendukung pencapaian misi pertama, Dinas Perikanan mempunyai 4 (empat) program unggulan yaitu:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Berdasarkan program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025, Dinas Perikanan mendapat alokasi anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 4.603.327.294,00,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.330.103.544, dan Belanja Modal sebesar Rp. 273.223.750,- . Raelisasi belanja daerah sebesar Rp 4.358.608.656,00,- atau sebesar 94.70 %.-. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan dan bersumber dari Dana Alokasi Umum untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Perikanan di atas ikaitkan dengan telaah visi dan misi Bupati Sumba Barat Daya selanjutnya diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian misi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor pendukung dan penghambat tersebut:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Balai Benih Ikan (BBI Waikelo Sawah)	- Belum Maksimalnya Produksi Benih Ikan di Balai Benih Ikan (BBI) Waikelo Sawah	- Sumber Daya Manusia Pendukung Kegiatan Produksi Benih yang belum Kompeten dalam melaksanakan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
		- Ketersediaan Pakan Alami untuk pembenihan Ikan (Cacing Sutera dan Kutu Air)	- Keterbatasan anggaran - Sarana prasarana peralatan pengolahan masih kurang Keterbatasan Anggaran dalam Penyediaan Sarana Pakan Alami (Cacing Sutera dan Kutu Air) dan Pakan Buatan sebagai Penunjang Kegiatan Pembenihan dan Pembesaran Ikan
		- Ketersediaan Pakan Buatan untuk Benih Ikan	

		- Tidak tersedianya Indukan Unggul di BBI Waikelo Sawah (Ikan Nila & Karper)	- Indukan yang ada di Balai Benih Ikan (BBI) Waikelo Sawah sudah tidak produktif untuk menghasilkan benih yang baik.
2	Balai Benih Ikan (BBI Karita)	- Tidak berjalannya semua aktifitas dan Kegiatan Pembenihan dan pembesaran ikan di Balai Benih Ikan (BBI) Karita	- Ketersediaan sumber air sebagai penunjang utama kegiatan di Balai Benih Ikan (BBI) Karita - Minimnya Ketersediaan anggaran untuk mendukung pemulihan kegiatan Pembesaran dan Pembenihan Ikan di Balai Benih Ikan (BBI) Karita
3	Penyediaan sarana dan Prasarana Rumput Laut	- Belum tersedianya Sarana Prasarana Kebun bibit rumput Dinas Perikanan	- Lokasi Kebun Bibit yang tidak tersedia secara tetap/permanen - Sarana prasarana penunjang kegiatan rumput laut (Meja Jemur, Rumah Ikut, MCK, Tempat Sampah, Sampan Fiberglass, Tali Rumput Laut dan Listrik) - Tidak adanya Bibit Unggul Rumput Laut yang terbarukan
4	Penyediaan sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar untuk Kelompok	- Banyaknya kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Sumba Barat Daya yang belum terfasilitasi Bantuan pemerintah	- Kurangnya ketersediaan anggaran dalam pemenuhan kegiatan Penyediaan sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar untuk Kelompok
5	Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan	- Banyak kelompok yang belum terfasilitasi bantuan pemerintah - Belum tersedianya prasarana pendukung penunjang penangkapan ikan	- Kurangnya ketersediaan anggaran

		(Pabrik es dan Cold Storage)	
6	Pemberian fasilitas peralatan coollbox fiberglass	- Belum semua pemasar ikan mendapatkan Coolbox	- Keterbatasan anggaran
7	Pemberian fasilitas peralatan pengolahan hasil perikanan	- Belum semua kelompok pengolahan mendapat bantuan peralatan pengolahan - Kurangnya pelatihan pengolahan bagi pelaku pengolahan	- Keterbatasan anggaran - Sarana prasarana peralatan pengolahan masih kurang

2.2 Program Dinas Perikanan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis terpadu dan dilaksanakan yang meliputi program kerja keuangan, program kerja operasional dan program kerja sumberdaya manusia. Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2023 mempunyai program kerja meliputi:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Penetapan Tujuan, sasaran, program, strategis kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba barat Daya periode 2019-2024 dapat juga ditampilkan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tujuan	Sasaran	Program
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang berkelanjutan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Penetapan Program beserta outcome, indikator outcome dan target dan pagu indikatif mulai tahun 2025 – 2030 dapat juga ditampilkan dalam bentuk tabel dibawah ini:

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					3.959.607.560,00		4.042.867.414,00		4.122.219.298,00		4.203.301.758,00		4.286.156.639,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.842.269.844,00		2.892.009.566,00		2.936.835.715,00		2.982.356.668,00		3.028.583.196,00	
Meningkatnya pelaksanaan operasional perangkat daerah	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	50,05	60,05	65,05	2.842.269.844,00	70,05	2.892.009.566,00	75,05	2.936.835.715,00	80,05	2.982.356.668,00	85,05	3.028.583.196,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					524.091.562,00		539.814.309,00		556.008.738,00		572.689.000,00		589.869.670,00	
Meningkatnya produksi Perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1.680	1.680	2.080	524.091.562,00	2.320	539.814.309,00	2.560	556.008.738,00	2.800	572.689.000,00	2.800	589.869.670,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					398.498.768,00		410.453.731,00		422.767.343,00		435.450.363,00		448.513.874,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Garam (Ton)	5	5	6	398.498.768,00	7	410.453.731,00	8	422.767.343,00	9	435.450.363,00	9	448.513.874,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	692	692	830		842		854		866		866		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					75.570.886,00		77.838.013,00		80.173.153,00		82.578.348,00		85.055.698,00	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman havati	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	100	100	100	75.570.886,00	100	77.838.013,00	100	80.173.153,00	100	82.578.348,00	100	85.055.698,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					119.176.500,00		122.751.795,00		126.434.349,00		130.227.379,00		134.134.201,00	
meningkatnya produksi olahan hasil perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	24,21	24,21	26	119.176.500,00	27	122.751.795,00	28	126.434.349,00	29	130.227.379,00	30	134.134.201,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
TOTAL KESELURUHAN					3959607560.00		4042867414.00		4122219298.00		4203301758.00		4286156639.00	

Berdasarkan program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025, Dinas Perikanan mendapat alokasi anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 4.603.327.294,00,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.330.103.544, dan Belanja Modal sebesar Rp. 273.223.750,-. Raelisasi belanja daerah sebesar Rp 4.358.608.656,00,- atau sebesar 94.70 %.-. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan dan bersumber dari Dana Alokasi Umum untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis.

Rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi
1	Belanja Operasi		
	Belanja Pegawai	2.329.109.950	2.132.785.102
	Belanja Barang dan Jasa	2.000.993.594	1.954.452.247
2	Belanja Modal		
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.172.750	155.370.750
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	116.051.000	116.000.557
JUMLAH		4.603.327.294	4.358.608.656

Dari rincian yang ditampilkan pada tabel diatas realisasi anggaran Dinas Perikanan sangat baik yaitu mencapai 94,70 %, tahun lalu realisasinya sebesar 95,27 % artinya ditahun ini realisasi dinas Perikanan mengalami penurunan sebesar 0,57 persen.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Rumus perhitungan presentase pencapaian kinerja yaitu:

$$\frac{\text{Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)}}{\text{Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)}} \times 100\%$$

Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam “Skala Pengukuran Ordinal” sebagai berikut:

No	Skala Presentase Capaian Kinerja	Predikat
1	>100%	Sangat berhasil
2	<85%	Berhasil
3	<70%	Cukup berhasil
4	< 55%	Tidak berhasil

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak (capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1.1).

3.1.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kinerja sasaran ini mencapai rata-rata 132,6 % dengan predikat sangat berhasil. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 2 program dan 2 kegiatan dengan menetapkan 3 indikator kinerja. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1.1 Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
1.	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	1.680	2.013	120
	Produksi perikanan budidaya (Ton)	692	840,484	121
	Produksi Garam (ton)	5	623,700	12.474
	Rata-rata	792	1.050,4	132,6 %

Dari hasil indikator kinerja diatas nampak bahwa produksi perikanan tangkap mencapai 120% karena adanya penambahan sarana parasma penangkapan ikan berupa mesin dan alat penangkapan ikan dari pemerintah dan juga swadaya masyarakat itu sendiri yang mendukung hasil tangkapan nelayan.

Hasil indikator kinerja produksi perikanan budidaya mencapai 121% karena adanya penambahan kelompok-kelompok pembudidaya ikan dan pembudidaya rumput laut yang difasilitasi oleh pemerintah berupa paket budidaya ikan (Kolam terpal, pakan ikan serta benih ikan Nila dan Lele)

Hasil indikator kinerja produksi garam mencapai 12.474% karena pada saat penentuan target di Renstra belum selesai dilaksanakan pendataan produksi garam pada seluruh kelompok pemasak garam sehingga target masih merupakan prediksi. Diharapkan pada revisi renstra, target akan disesuaikan dengan kondisi ril.

3.1.2 URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan untuk mencapai 5 (lima) indikator sasaran yaitu produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, produksi garam, kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dan konsumsi ikan.

Dalam mendukung sasaran dan indikator kinerja tersebut Dinas Perikanan melaksanakan 5 program strategis, 8 kegiatan dan 15 sub kegiatan, dan dalam usaha mencapai sasaran ini Dinas Perikanan melaksanakan berbagai kegiatan dan belanja pengadaan dalam mendukung pencapaian sasaran dan indicator kinerja di tahun 2025

Pengadaan –pengadaan yang dilaksanakan tahun 2025 adalah:

NO	Jenis Bantuan	Tahun 2025	Satuan
1.	Mesin Ketinting 6,5 PK Lengkap (DAU)	22	Unit
2.	Gillnet Multifilament Lengkap 2,5 inch (DAU)	27	Buah
3.	Gillnet Monofilament 2 inch (DAU)	19	Unit
4.	Mesin Enduro 15 PK	3	Unit
5.	Kolam Terpal	46	Lembar
6.	Benih Ikan Lele Sangkuriang	21.500	Ekor
7.	Pakan Ikan	3.780	Kg
8.	Benih Ikan Nila	1.000	Ekor
9.	CoolBox Fiberglass	40	Unit

Kebijakan yang tertuang dalam program kegiatan Dinas Perikanan inilah yang akan menunjang pencapaian target kinerja dalam mendukung visi misi Bupati Sumba Barat Daya 2025-2029.

3.1.3 EVALUASI KINERJA DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN

Evaluasi Kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil dan kinerja organisasi, sedangkan tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan analisis akuntabilitas keuangan adalah tindakan pertanggungjawaban keuangan atas hasil yang diperoleh:

Hasil evaluasi kinerja yang ditunjukkan pada Pada tabel 3.1.1 adalah:

1. Target produksi perikanan tangkap pada tahun 2025 pada Renstra Dinas Perikanan sebesar 1.680 ton, realisasi mencapai 2.013 ton disebabkan adanya penambahan jumlah sarana prasarana tangkap sesuai data kinerja.

2. Target produksi perikanan budidaya pada tahun 2025 pada Renstra dan Renstra Dinas Perikanan sebesar 692 ton, realisasi 840,484 ton. Pencapaian Target pada Produksi Perikanan Budidaya lebih besar dari target pada tahun 2024 disebabkan adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pembudidaya ikan, kondisi iklim yang sesuai, kualitas pakan yang lebih baik dengan nilai protein yang lebih tinggi, dan juga tahun 2025 total produksi budidaya merupakan hasil penjumlahan produksi budidaya ikan air tawar dan produksi rumput laut. Nilai tukar nelayan Rp 1,159,000 menggambarkan pendapatan nelayan perbulan yang diperoleh dalam satu tahun. Artinya nelayan sudah memiliki penghasilan tambahan sekitar satu juta lebih dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Target Produksi Garam pada Renstra Dinas Perikanan tahun 2025 sebesar 5 ton, realisasi sebesar 623,700 ton. Realisasi yang jauh dari target disebabkan pada saat menyusun target produksi garam di Renstra, petugas belum selesai melakukan pendataan.

3.1.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kemampuan pengelolaan anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 dapat disampaikan melalui tabel berikut ini:

Tabel. 3.1.4.1. Realisasi Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	
1	2	3	4	5	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
	A	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.927.000	10.927.000	-
		Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.160.000	5.160.000	-
	B	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.329.109.950	2.133.353.972	195.755.978
		Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	63.119.000	63.119.000	-
		Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.750.000	17.750.000	-
	C	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.355.000	10.355.000	-
		Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.887.000	9.887.000	-
		Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.703.000	130.703.000	-
	D	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		Sub Keg. Pengadaan Mebel	69.106.250	69.106.250	-
		Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.291.800	87.489.800	1.802.000

	E	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.292.000	20.667.180	624.820
		Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.737.496	63.181.690	1.555.806
	F	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.811.000	105.589.437	2.221.563
		Sub Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya	123.007.000	122.956.557	50.443
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
	A	Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
		Sub Keg. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	19.639.600	19.639.600	-
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	228.461.762	228.430.000	31.762
		Penyediaan Usaha Perikanan Tangkap	477.256.000	475.873.600	1.382.400
	B	Keg. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	95.656.200	94.756.200	900.000
		Sub Keg. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	6.183.000	6.183.000	-

		Sub Keg. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	6.845.000	6.845.000	-
	C	Keg. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
		Sub Keg. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	6.845.000	6.845.000	-
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
	A	Keg. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			
		Sub Keg. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	24.600.000	24.600.000	-
	B	Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			
		Sub Keg. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.520.000	16.520.000	-
		Sub Keg. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	149.240.000	149.240.000	-
		Sub Keg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.159.048	270.141.572	30.017.476
4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	A	Keg. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			
		Sub Keg. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	100.783.688	91.449.168	9.334.520

5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
	A	Keg. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil			
		Sub Keg. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.735.500	9.735.500	-
	B	Keg. Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
		Sub Keg. Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.668.000	32.410.000	258.000
		Sub Keg. Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	76.773.000	76.703.000	70.000
	Jumlah		4.603.327.294	4.359.177.526	244.149.768

Tabel diatas menunjukkan penyerapan anggaran rata rata sangat baik pada setiap kegiatan hingga mencapai 90-100 %.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja sebagaimana diuraikan pada BAB III tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja tiap indikator sangat baik.
2. Capaian kinerja Dinas Perikanan dalam 2 tahun terakhir sangat baik, dilihat dari pencapaian target dalam tiap indikator dan realisasi fisik dan keuangan tiap kegiatan.

Capaian yang diperoleh merupakan usaha dan Kerjasama yang baik dari semua aparatur Dinas Perikanan. Kedepannya tetap mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengukur prestasi dan kinerja yang lebih baik dan mendorong semua pihak untuk berpikir inovatif dan bertindak kreatif pada pelaksanaan anggaran pada tahun yang akan datang.

Demikian LKIP ini, semoga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan pelayanan kemasyarakatan kedepan.

Tambolaka, 20 Januari 2025


Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Sumba Barat Daya,
Drh. Heryanto B. Bora
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 19780417 200803 1 001